

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH
KAMPUNG SIMPANG PERAK JAYA KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Univrsitas Islam Riau



Oleh :

Rosaliana

NPM : 177310484

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rosaliana
NPM : 177310484
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Simpang Perak Jaya Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif

Pekanbaru, 9 Agustus 2021

Pembimbing

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Andriyus,S.Sos.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rosaliana
NPM : 177310484
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa
Simpang perak jaya Kabupaten siak

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua

Pekanbaru, 9 Agustus 2021

An. Tim Penguji

Sekretaris

Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Anggota

Dr, Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

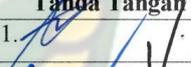
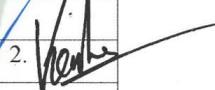
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 128/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 07 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 08 Juli 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rosaliana
NPM : 177310484
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Fungsi Pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa Simpang Parah jaya Kabupaten Siak (Studi Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tentangga dan Rukun Warga).**

Nilai Ujian : Angka : "78.77" ; Huruf : "B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.Sos, M.Si	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP, M.Si	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, S.IP, M.Tr.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 08 Juli 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 112/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- Nama : Rosaliana
N P M : 177310484
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Fungsi Pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa Simpang Parah jaya Kabupaten Siak (Studi Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tentanga dan Rukun Warga).**
- Struktur Tim :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Andriyus, S.Sos, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Arif Rahman Hakim, S.IP, M.Tr.IP | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 Juli 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

- Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
 3. Yth. Ketua Prodi.....
 4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rosaliana
Npm : 177310484
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Simpang perak jaya Kabupaten Siak.

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat syahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Ketua

Andriyus, S.Sos, M.Si

Pekanbaru, 9 Agustus 2021

An. Tim Penguji

Sekretaris

Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Turut menyetujui

Wakil Dekan 1

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program

Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.SIP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga diridhoi oleh Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya atas dukungan, serta bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga penyusunan Usulan Penelitian inii.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam

menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Andriyus, S.Sos,m.Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal hingga selesai.
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anaknya agar menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada kakak dan abang-abang yang juga selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib adiknya agar menjadi lebih baik

9. Terimakasih kepada Nova sri nurahmah dan risti eka putri sahabat seperjuangan diperantauan yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan nova sri nurahmah, Charisma Listiani, Amira, Risti Eka Putri, Weni Hermayuli dan Adinda Ayu Pradina, serta teman-temang yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Usulan Penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penullis berharap kemakluman dari para pembaca. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 9 Agustus 2021

Penulis

Rosaliana

PERNYATAAN KASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosaliana
NPM : 177310484
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S.1)
SKRIPSI : Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Simpang Perak Jaya (Studi Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga)

Atas naskah yang didaftarkan pad ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Agustus 2021
Pelaku Pernyataan,



Rosaliana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
PERNYATAAN KASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Ilmu Pemerintahan	18
2. Konsep Pemerintahan.....	19
3. Konsep Pemerintahan Desa.....	21
4. Konsep Fungsi.....	25
5. Konsep Pemberdayaan	26
6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	27
7. Konsep Lembaga Kemasyarakatan	30

8. Konsep Rukun Tetangga	32
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Pikir	35
D. Konsep Operasional	36
E. Operasionalisasi Variabel.....	37
BAB III : METODE PENELITIAN.....	39
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Informan dan Key Informan.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	40
F. Jadwal Kegiatan Penelitian	42
G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	43
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	45
A. Sejarah Singkat Kabupaten Siak	45
B. Profil Desa Simpang Perak Jaya	53
C. Gambaran Umum Desa Simpang Perak Jaya	54
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Identitas informan	57
1. Jenis kelamin informan.....	58
2. Usia informan.....	59
3. Pendidikan informan	60
B. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Simpang Perak Jaya Kabupaten Siak (Studi kasus lembaga kemasyarakatan rukun tetangga dan rukun warga).....	61
1. Pemungkinan.....	62
2. Penguatan.....	66

3. Penyokongan.....	68
4. Pemeliharaan.....	71
5. Perlindungan.....	73

BAB VI : PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	81





DAFTAR TABEL

Tabel :

I.1 Daftar Nama Peserta Pelatihan Menjahit dari Ibu-Ibu PKK Desa Simpang Perak Jaya	10
I.2 Daftar Nama Anyaman Lidi Desa Simpang Perak Jaya	10
I.3 Daftar Nama Pelatihan Kegiatan Hidroponik	11
I.4 Daftar Nama Pembinaan Remaja Masjid.....	11
I.5 Daftar Nama Pengurus Kelompok PKK Dasa Wisma Matoa	12
II.1 Penelitian terdahulu	34
II.2 Kerangka Pikir.....	35
II.3 Oprasional Variabel.....	37
III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Simpang Perak Jaya Kabupaten Siak (Studi Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga....	42
IV.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dikabupaten Siak.....	49

IV.2 Luas Wilayah Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan.....	50
IV.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan.....	51
IV.4 Jumlah Penduduk Desa Simpang Perak Jaya.....	55
IV.5 Tingkat Pendidikan Desa Simpang Perak Jaya.....	56
IV.6 Pekerjaan Desa Simpang Perak Jaya.....	56
V.1 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Usia.....	59
V.3 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Pendidikan.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar :

II.II Kerangka Pikir Pemberdayaan masyarakat Oleh Pemerintah Desa Simpang Perak Jaya Kabupaten Siak.....	35
---	----



FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA SIMPANG PERAK JAYA KABUPATEN SIAK

ABSTRAK

Rosaliana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa didesa simpang perak jaya. Penelitian ini menggunakan metode penilitian deskriptif kualitatif, Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pemberdayaan Edi Suharto. Adapun indicator dalam penelitian ini yaitu pemungkinan, penguatan, penyokongan, pemeliharaan dan perlindungan. Penelitian ini dilakukan di Desa Simpang perak jaya kabupaten siak. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan Informasi dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu cara penentuan informasi ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu yaitu dengan melibatkan orang-orang tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa simpang perak jaya kabupaten siak Belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan oleh beberapa factor baik factor internal dan factor eksternal seperti kurangnya sosialisasi pemerintah desa terhadap masyarakat, dan kurangnya juga partisipasi dari masyarakatnya.

Kata Kunci : Fungsi, Pemberdayaan, Masyarakat, dan Pemerintah Desa

**COMMUNITY EMPOWERMENT FUNCTION BY THE GOVERNMENT
OF SIMPANG PERAK JAYA VILLAGE, SIAK DISTRICT
(STUDY OF COMMUNITY INSTITUTIONS AND COMMUNITY
HOUSEHOLD AND COMMUNITY HOUSEHOLD)**

ABSTRACT

Rosaliana

The purpose of this research is to find out how the function of the implementation of community empowerment by the government of the study village of neighborhood and community groups in Simpang Perak Jaya Village. This study used a qualitative descriptive research method. The theory used in this study was using the empowerment of Edi Suharto. The indicators in this study are enabling, strengthening, supporting, maintaining and protecting. This research was conducted in the village of Simpang Perak Jaya, Siak Regency. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The technique of determining information is done by using purposive sampling, which is a way of determining information determined deliberately on the basis of certain criteria or considerations, namely by involving certain people. Based on the results of the study, it can be concluded that the function of community empowerment by the village government of Simpang Perak Jaya, Siak Regency has not been carried out properly, this is due to several factors both internal and external factors such as the lack of socialization of the village government to the community, and the lack of participation from the community.

Keywords: Function, Empowerment, Community, and Village Government

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang”. Dan dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut di atur dalam Pasal 18 A ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang tara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan

urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdistribusi ke Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas menurut Soetarjo dan Yulianti dalam Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir (2007:7). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut undang-undang no 6 tahun 2014. Desa memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk dua kali masa jabatan. Kepala Desa bisa menjabat selama tiga kali berturut – turut atau tidak berturut-turut. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Organisasi pemerintahan desa termasuk salah satu bentuk organisasi sosial.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Menurut undang – undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. Didalam tugas kepala desa dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa. Perangkat Desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya. Selain itu, Kepala Desa juga berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Pada Perda no 8 thn 2001 tentang susuna organisasiD data tata kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten siak, Urusan Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Desa, melaksanakan Administrasi penduduk, Administrasi Pertanahan dan Pembinaan Sosial Politik. Pada pasal 10 dijelaskan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan urusan pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Desa
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik
- e. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Pada pasal 11 dijelaskan dalam urusan pembangunan sebagai Berikut :

1. Urusan Pembangunan adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Kepala Desa dalam bidang pembangunan
2. Urusan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh maksimal 2

(dua) orang tenaga honorer sesuai dengan beban kerja, kemampuan Desa dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Pembangunan Desa, pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian Masyarakat Desa, sumber-sumber pendapatan Desa.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 12 Urusan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai Berikut

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan Desa
- b. Peningkatan kegiatan, serta Pengembangan sarana dan prasarana
- c. Pendataan, pengelolaan, dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik Desa
- d. Peningkatan dan Pengembangan sumber-sumber Pendapatan Desa
- e. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

Pada pasal 14 dijelaskan dalam urusan Agama dan Kesejahteraan Rakyat.

1. Urusan Agama dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Kepala Desa di bidang agama dan kesejahteraan rakyat
2. Urusan Agama dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu

oleh maksimal 2 (dua) orang tenaga honorer sesuai dengan beban kerja, kemampuan Desa dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembinaan mental spritual agama, Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, sosial pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda, wanita, kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Pada Pasal 16 dijelaskan Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan keagamaan
- b. Pencatatan dan pelayanan administrasi Nikah Talak Rujuk dan Cerai
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial
- d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemuda, olah raga dan wanita
- f. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat
- g. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat

Berdasarkan Data yang diperoleh Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa simpang perak jaya kabupaten siak dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel I.1 Daftar Nama Peserta Pelatihan Menjahit Dari Ibu-Ibu PKK Desa Simpang Perak Jaya.

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	SITI SUNDARI	KETUA
2	ATIK PRASTYO	SEKERTARIS
3	PONI ATIK	ANGGOTA
4	DOHARNI	ANGGOTA
5	LILI YANI	ANGGOTA
6	AJI MAHENGGAR KELIWAJANI	ANGGOTA
7	DEWI JANNAH HAYATI	ANGGOTA
8	FERY MIRTALIA SARI	ANGGOTA
9	WINATUN	ANGGOTA

Sumber : Data desa simpang perak jaya

Tabel I.2 Daftar Nama Anyaman Lidi Desa Simpang Perak Jaya.

A	B	C
1	Kartini	Ketua
2	Nurohmah	Sekertaris
3	Suharti	Anggota
4	Sariyah	Anggota
5	Nailu Arifatus. S	Anggota
6	Mustika	Anggota
7	Suparti	Anggota
8	Susi Ermawati	Anggota
9	Sundari	Anggota
10	Sugiyanti	Anggota
11	Ningsih	Anggota
12	Siti Robiah	Anggota
13	Rusmiasih	Anggota
14	Nunik	Anggota
15	Sutriyana	Anggota
16	Sulastri	Anggota
17	Saminah	Anggota
18	Suwarni	Anggota
19	Ika Nurjanah	Anggota

Sumber : Data desa simpang perak jaya 2021

Tabel I.3 Daftar Nama Pelatihan Kegiatan Hidroponik

A	B	C
1	JASMANI	KETUA
2	H. ABDUL MUSAHAB SIREGAR	WAKIL KETUA
3	PARIKUN	SEKERTARIS
4	ROBBI HANDIKA	ANGGOTA
5	ABDUL GHOFUR	ANGGOTA
6	SUKABRI KATONO	ANGGOTA
7	CIPTO MULYONO	ANGGOTA
8	RISTIAN, F.M	ANGGOTA
9	ERYANTO	ANGGOTA
10	SURYA DARMA	ANGGOTA
11	NURUDIN SHOLEH	ANGGOTA
12	SUHERMANTO	ANGGOTA
13	BOIMAN	ANGGOTA
14	HARYOKO	ANGGOTA
15	M. HABIBI, R	ANGGOTA
16	WALUYO	ANGGOTA
17	NOVITA ERAWATI	ANGGOTA
18	PRISKI DWLP	ANGGOTA
19	MUHAMMAD ASROPI	ANGGOTA
20	WIDIANTORO	ANGGOTA
21	FITA UTAMI	ANGGOTA
22	SALDIAN SYAHPUTRA	ANGGOTA
23	SUNDARI	ANGGOTA

Tabel I.4 Daftar Nama Pembinaan Remaja Masjid

A	B	C
1	Penghulu Kampung	Pelindung
2	Takmir Masjid Baiturohim	Penasehat
3	Ibnu Sulaiman, S.Kom	Ketua
4	M. Khoirunas. R	Wakil Ketua
5	Nurudin Sholeh	Sekretaris
6	Andriansyah	Bendahara
7	Widiantoro	Seksi Humas
8	Muhammad Asrofi	Seksi Humas
9	Iswan Hadi	Seksi Humas
10	Syamsul Riyanto	Seksi Humas
11	Davit Tanri	Seksi Program
12	Masrucin Sakur	Seksi Program
13	Ahmad Rudianto	Seksi Program
14	Toni Maula	Seksi Program

15	Hendra Saputra	Seksi Perlengkapan
16	Febri Kurniawan	Seksi Perlengkapan
17	Wahid Riski Al Faris	Seksi Perlengkapan
18	Muhamad Fauzi	Seksi perlengkapan
19	Ahmad Budi Nur Sidik	Seksi Keamanan
20	Ristian Faridul.M	Seksi Keamanan
21	Ahmad Arif Hidayatullah	Seksi Keamanan
22	Aris Siswanto	Seksi Keamanan
23	Segenap Anggota Irmis Baiturahman	Anggota

Tabel I.5 Daftar Nama Pengurus Kelompok PKK Dasa Wisma Matoa

A	B	C
NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	SUMINI	KETUA
2	RUSMIASIH	SEKERTARIS
3	SITI KHASANAH	BENDAHARA
4	MASUA	ANGGOTA
5	NGATINI	ANGGOTA
6	TUMINAH	ANGGOTA
7	KAMILA	ANGGOTA
8	MARTINA	ANGGOTA
9	MARLINA	ANGGOTA
10	ATIK	ANGGOTA
11	SATIAH	ANGGOTA
12	NIRWATI	ANGGOTA
13	SUMINAH	ANGGOTA
14	PULUNG	ANGGOTA
15	SUWARTI	ANGGOTA
16	PUJIATI	ANGGOTA
17	DALISAH	ANGGOTA

Sumber: Data desa simpang perak jaya 2021

Dalam penelitian ini penulis mengambil di pemberdayaan masyarakat simpang perak jaya kecamatan kerinci kanan kabupaten siak tersebut yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Terindikasi kurang berjalan nya gotong royong secara rutin sehingga sampah masih banyak ditemukan di jalan. Seperti yang dilihat masih banyak sampah yang berserakan dikarenakan kurang berjalannya gotong royong. kegiatan gotong royong ini dilakukan seminggu sekali, pada awalnya kegiatan gotong royong ini berjalan dengan lancar namun saat ini kegiatan itu sudah tidak dilaksanakan lagi karena tidak adanya lagi ajakan dan ketegasan dari pemerintah desa.
2. Terindikasi masih kurangnya partisipasi warga dalam mengikuti kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Desa
3. Terindikasi kurangnya pemerintah Desa membimbing dan mendukung masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan judul ; “fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang dan fenomena empiris diatas, bahwa penyelenggaraan pemerintahan di desa simpang perak jaya masih kurang berjalan maksimal sesuai yang diharapkan. Oleh

karena itu penulis merumuskan suatu masalah yakni : **“Bagaimana fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Di Desa simpang perak jaya Kecamatan kerinci kanan Kabupaten siak?”**

B. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana fungsi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didesa simpang perak jaya dan untuk mengetahui mengapa kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

C. .Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian dari penelitian adalah :

- a.) Guna akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dan topik yang sama. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan.
- b.) Guna teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi refrensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang fungsi pemberdayaan masyarakat(studi lembaga kemasyarakatan rukun warga dan rukun tetangga).

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Simpang Perak Jaya Kabupaten Siak, maka penulis menggunakan beberapa konsep teoritis yang erat kaitanya dengan penelitian yang akan penulis teliti, antara lain :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut Syafiie 2003 ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Sehingga melihat dari definisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga

pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan yang berlaku pada Negara.

2. Konsep Pemerintahan

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut

Menurut Ndraha 2003 pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Menurut Apter, pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan (Dalam Syafiie, 2005:21).

Menurut Rasyid dalam Giroth (2004:65) adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan memaknainya sebagai proses penegakkan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan member kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (service), pemberdayaan powerment) dan pembangunan (development). (dalam Rauf, 2014:28)

Rasyid (2000:13) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah :

- a) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan.
- b) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan
- c) apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- d) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka keberadaan mereka

- e) Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih terlaksana.
- f) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
- g) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.

Jadi menurut konsep-konsep yang telah di jelaskan mengenai pemerintahan dan pemerintah dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah sekelompok organisasi kenegaraan yang memiliki kekuasaan yang berkewajiban melindungi kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, sedangkan pemerintah adalah badan atau lembaga dalam pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka atau upaya mencapai tujuan Negara yang telah di tentukan oleh undang-undang yang berlaku.

3. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa yaitu Kepala desa atau dengan nama lain, dibantu perangkat desa unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara tegas memberikan tugas pada pemerintahan desa dengan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ”

atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri.

Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).¹ Pada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan masyarakat desa yang sekarang disebut juga dengan nama pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya serupa dan setara dengan konsep pengembangan masyarakat (community development atau

CD). Perkembangan teori pembangunan desa itu dimulai dari praktik, yaitu dari kebutuhan yang dirasakan di dalam masyarakat terutama dalam situasi sosial yang dihadapi didalam Negara-negara yang menghadapi perubahan sosial yang cepat. kata kunci dari dalam pembangunan pedesaan adalah guna “memberdayakan” kelompok miskin di daerah pedesaan. Sebagai gambaran dari pendekatan yang beragam ini, dengan mengambil contoh ilustrasi dari berbagai program pemerintah dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan desa di Indonesia selama ini, ada tiga pola pendekatan yang telah pernah dilaksanakan. Pendekatan pertama adalah pola instruktif, atau seringkali juga diidentifikasi sebagai strategi top down. Pendekatan kedua adalah pola konsultatif, atau diidentifikasi dengan pola “bottom up top down”. Pendekatan ketiga adalah pola pendampingan. Pendekatan ini merupakan perbaikan lebih lanjut dari pola konsultatif.

Sedangkan Widjaja (2004:5) mengatakan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian tentang pemerintahan Desa dinyatakan, yakni: “pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rauf & Maulidiah, 2015:19)

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh Perundang-Undangan yang diserahkan kepada Desa.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program Pemerintah. Memperkuat Desa merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, selain mendudukan Desa menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, kepastian tersedianya pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta tersedianya SDM yang mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

4. Konsep fungsi

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Menurut Moekijat (2008) mengemukakan bahwa: Fungsi merupakan rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan menurut Moekijat (2008 : 22) mengemukakan bahwa: Fungsi merupakan sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama.

5. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya Pemberdayaan menekankan bahwa orang

memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Edi Suharto 2006 pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana, masyarakat akan menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi, berbagi pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan pada masyarakat untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Ketentuan

umum pasal 1 ayat 12) Pemberdayaan masyarakat pada perinsipnya yaitu menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa.

Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Dan pemberdayaan masyarakat mengakui dan memfungsikan institusi asli dan yang suda ada dimasyarakat desa implementasi UUD desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa, UU desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran saja).

6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mubarak Ali (2010) Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Secara harfiah, pemberdayaan bias diartikan sebagai “pemberkuasaan” kepada masyarakat yang lemah istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan dan pengetesan kemiskinan. namun hal yang penting dalam proses pemberdayaan yaitu peningkatan kesadaran masyarakat

yang sadar adalah masyarakat yang memahami hal-hal dan tanggung jawab secara politik, ekonomi dan budaya.

“Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi (Widjaja, 2003:169).

Menurut Edi Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai

tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi juga pada dasarnya sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara

substansial merupakan proses memutus (breakdown) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Tujuan Pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dalam masyarakat dibentuk dalam potensi yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tujuan memperkuat potensi
3. Pemberdayaan dilakukan sebagai langkah meningkatkan modal social
4. Tujuan pemberdayaan dalam masyarakat dilakukan dalam upaya membentengi masyarakat dari berbagai ketertindasan dalam aspek-aspek ekonomi.

Menurut Eko Sutoro (2004:11) Pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi membangun peradaban dan kemandirian masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Tentang Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintahan Desa Simpang Jaya Kabupaten Siak

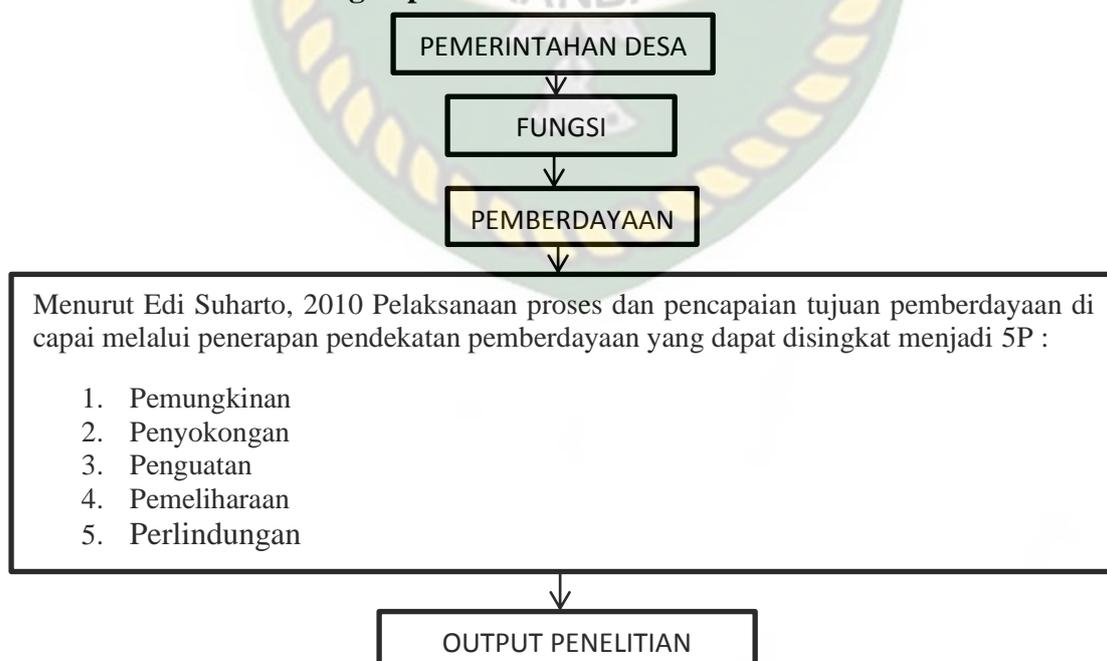
No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Astrella Janice	Pelaksanaan tugas dan fungsi badan pemberdayaan masyarakat desa (BPMD)dalam pembangunan desa di desa tanjung lapang kabupaten malinau.	Sama-sama menggunakan metode kualitatif	Lokasi penelitian ini didesa tanjung lapang sedangkan lokasi penelitian saya di desa simpang perak jaya.
2.	Lasmian Sugiri	Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat	Sama-sama membahas tentang pemberdayaan	Penelitian ini tentang peranan sedangkan penelitian saya tentang fungsi.
3	Ace lingga Sari	Fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dikabupaten lingga	sama-sama menggunakan metode kualitatif	Lokasi penelitian,

4	Syahrul ramadhan	Analisis fungsi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam kinerja aparatur pemerintah desa dikecamatan bengkalis Sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini tentang analisis sedangkan penelitian saya tentang fungsi
5	Fitri ramadhani	Evaluasi pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat desa didesa kampung baru kecamatan cerenti kabupaten kuantan singing.	Sama-sama membahas tentang pemberdayaan desa.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pemikiran sebagai konsep untuk menganalisis variable dalam penelitian ini, yang digambarkan dalam bagian kerangka pikir ini yaitu:

Gambar II.11 Kerangka pikir



Sumber : Data olahan penulis, 2020

D. Konsep Oprasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis memaparkan penjelasan tentang pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa, yaitu sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat ini adalah suatu proses pembangunan yang mana masyarakatnya itu mempunyai inisiatif didalam memulai proses kegiatan atau aktivitas social, didalam memperbaiki situasi serta kondisi didiri sendiri.
2. keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
4. Masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang saling berhubungan satu sama lain dalam jangka waktu yang cukup lama dan mempunyai tujuan tertentu.
6. Penduduk setempat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Rukun Tetangga yang bersangkutan.

E. Operasional Variabel

Tabel : II.III Operasional Variable dari Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintahan Desa Simpang Perak Jaya Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana, masyarakat akan menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi (Edi Suharto 2006:61)	Fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa	pemungkinan	-Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. -Memberikan pembinaan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal. -mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan.
		Penguatan	-Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah -Memberikan pendapat dan pengarahan kepada masyarakat
		Penyokongan	-Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan Tugas-tugasnya -Mampu menyokong masyarakat agar tidak terjadi dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpingirkan.

	Pemeliharaan	-Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagi kelompok dalam masyarakat.
	Perlindungan	-Mampu melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindak oleh kelompok lain.

Sumber : Modifikasi Penulis,2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang didapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh sebuah kebenaran, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan untuk mendapatkan Data.

B. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi yang penulis ambil dalam “Fungsi Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa simpang perak jaya kabupaten siak(studi lembaga kemasyarakatan rukun tetangga dan rukun warga). penelitan adalah Desa simpang perak jaya.

C. Informan dan Key Informan

Teknik penarikan informan dan key informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Menurut Arikunto (2010:183), sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. memberi saran tentang sumber bukti yang

mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan.

Tabel III.I Informan dan Key Informan

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Kepala Desa Simpang Perak Jaya	Rubiman Zainuri	Key Informan
2	Kaur Perencanaan Desa Simpang Perak Jaya	Abdul Ghofur	Informan
3	Kerani Desa Simpang Perak Jaya	M. Habibi Rachman, Sp	Informan
4	Ketua Rt Desa Simpang perak Jaya	Andreas	Informan
5	Ketua Rw Desa Simpang Perak Jaya	Abdullah Wahid	Informan
6	Masyarakat Desa Simpang Perak Jaya	Suyadi	Informan

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yang dimaksud data primer disini adalah data yang dijadikan data utama untuk memperoleh hasil penelitian.

2. Data Skunder

Data Skunder yang dimaksud adalah data pendukung atau data yang diperoleh dari pihak kedua, berupa Dokumentasi, laporan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, standar operasional prosedur dan pendukung lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan data yang jelas dan lengkap dalam suatu penelitian maka peneliti dituntut kemampuannya untuk memilih tehnik yang tepat. Atas dasar itu maka untuk memperoleh data yang lengkap dan

obyektif penyusunan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

yaitu tehnik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Tehnik ini bermanfaat untuk mendapatkan serta mengetahui sejumlah peristiwa penting yang tidak mungkin bisa diperoleh dengan tehnik koesioner dan interview, maka dapat diamati dengan observasi langsung.

2. Wawancara

yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung dengan responden berkaitan dengan objek penelitian.

3. Dokumentasi

adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan jalan mengadakan pencatatan-pencatatan atau mengambil gambar-gambar dari dokumen-dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.II Jadwal Waktu Penelitian Tentang Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Simpang Perak Jaya Kabupaten Siak (Studi Lembaga Kemasyarakatan rukun tetangga dan rukun warga)

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																
2.	Seminar UP																
3.	Revisi UP																
4.	Revisi Kuesioner																
5.	Rekomendasi Survei																
6.	Survei lapangan																
7.	Analisis Data																
8.	Penyusunan hasil penelitian (skripsi)																
9.	Konsultasi Revisi Skripsi																
10.	Ujian Konfrehensif Skripsi																
11.	Revisi Skripsi																
12.	Penggadaan Skripsi																

Sumber : Data Modifikasi Berdasarkan Pedoman Penulisan UP FISIPOL UIR

2020

G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini membuat teori-teori yang digunakan sebagai tinjauan dalam menganalisis batasan masalah yang dikemukakan, kerangka pikir, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, metode penelitian, variable-variabel, operasional variable, data dan sumber data, dan teknik analisis data dan sistematika.

BAB IV : DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN

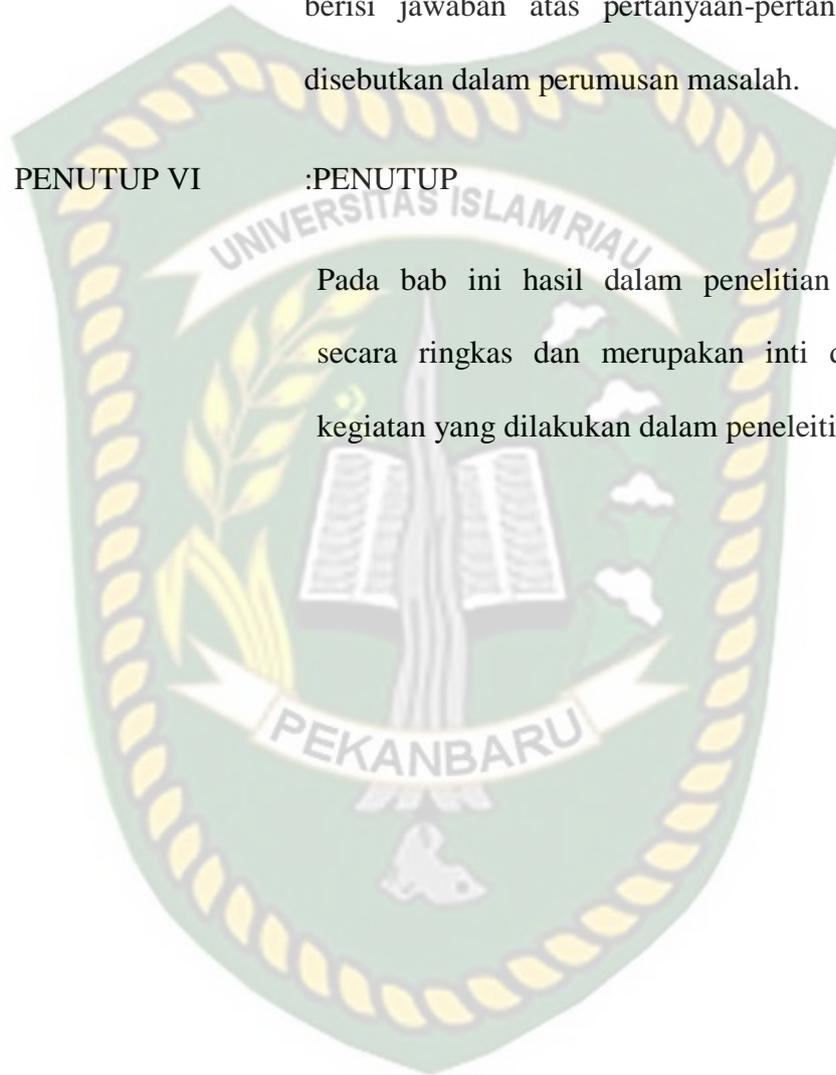
Bab ini berisi tentang gambaran instansi yang menjadi objek penelitian, dijelaskan pula sejarah perusahaan dari awal berdirinya.

BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

PENUTUP VI :PENUTUP

Pada bab ini hasil dalam penelitian dijelaskan secara ringkas dan merupakan inti dari semua kegiatan yang dilakukan dalam penelitian.



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Kabupaten Siak

1. Sejarah Kabupaten Siak

Pada tahun 1723 M berdirikann Kerajaan Siak Sri Indrapura oleh seorang Raja yang bernama Raja Kecil dengan Gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putra Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istri Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buatan. Nama Siak diambil dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak-banyak ditemui di daerah Buatan. Kerajaan Siak sebelumnya diperintah dan diawasi oleh seorang raja yang dititahkann oleh Sultan Johor dan berada dibawah kekuasaan Kerajaan Johor. Selepas hamper 100 tahun Kerajaan Siak tidak ada yang berkuasa, maka Wilayah ini diawasi langsung oleh seorang Syahbandar yang ditunjuk oleh Sultan Johor untuk memungut pajak Wilayah tersebut, Melihat peluang dan dengan keinginan besar atas wilayah tersebut, maka Raja Kecil mendirikan Kerajaan Siak bersama rakyatnya dan tidak lagi menghambat diri dibawah kekuasaan Kerajaan Johor...

Pada awal Tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, Istri yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minang Kabau. Sementara itu pucuk pimpinan kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor.

Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam Merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan rugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri.

Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru dipingir sungai Buatan (anak Sungai Siak). Demekian lah awal berdirinya kerajaan Siak di Buatan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Butan. Pusat Kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buatan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyidis Syarif Ismail Jalil Jalaludin (1827-1864) pusat Kerajaan pindah ke Kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-II yaitu Sultan Assayaidis Syarif Hasyim Abul Jalil Syaifudin yang memerintah pada tahun 1889-1908. Dibangunlah istana yang megah terletak dikota siak dan istana ini diberinama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889.

Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkempatan melewati ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung

Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifudin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim 11).

Bersamaan dengan proklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan berkemungkinan di Jakarta

Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim 11 mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim 11 terletak ditengah kota siak Sri Indrapura tepatnya disamping masjid Sultan yaitu masjid Syahabudin. Diawal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah Kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bngkalis yang kemudian berubah status menjadi kecamatan Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No.52 tahun 1999.

2. Pemerintahan Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di provinsi Riau, Indonesia sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Diawal Kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim 11, merupakan Sultan Siak

terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Kemudian Wilayah ini menjadi Wilayah Kewedanan Siak dibawah Kbaupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No 53 tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

Kabuptaen Siak Terdiri dari 14 kecamatan, desa dan kelurahan.

Tabel IV.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dikabupaten Siak.

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Minas	4	1
2	Kandis	8	3
3	Siak	6	2
4	Sungai Apit	14	1
5	Sungai Mandau	9	-
6	Kerinci Kanan	12	-
7	Lubuk Dalam	7	-
8	Tualang	8	1
9	Koto Gasib	11	-
10	Dayun	11	-
11	Bunga Raya	10	-
12	Mempura	7	1
13	Sabak Auh	8	-
14	Pusako	7	1
Jumlah		122	10

Sumber: BPS, Kabupaten Siak 2021.

3. Geografis Kabupaten Siak

Kabupaten Siak terletak pada posisi $1^{\circ}16'30''$ LU sd $0^{\circ}20'49''$ LU dan $100^{\circ}54'21''$ BT sampai dengan $120^{\circ}14'59''$ BT. Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis

Sebelah Selata : Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Kota Pkanbaru

Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan.

Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar dan Kota Pekanbaru.

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah berdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 250-320 Celcius.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak juga tasik atau danau yang terbesar di beberapa wilayah kecamatan. Tasik atau danau ini apabila dikembangkan dengan serius akan menjadi suatu objek wisata yang menarik.

Tabel IV. 2 Luas Wilayah Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	IbuKota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Minas	Minas Jaya	346,35	4,05
2	Kandis	Kandis	1.493,65	17,46
3	Siak	Kampung Dalam	894,17	10,45
4	Sungai Apit	Sungai Apit	1.346,33	15,74
5	Sungai Mandau	Muara Kelantan	1.705,00	19,93
6	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	128,66	1,50
7	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	155,09	1,81
8	Tualang	Perawang	343,60	4,02
9	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	704,70	8,24
10	Dayun	Dayun	232,24	27,1
11	Bunga Raya	Bunga Raya	151,00	1,76
12	Mempura	Sungai Mempura	437,45	5,11
13	Sabak Auh	Bndar Sungai	73,38	0,86
14	Pusako	Dusun Pusako	544,47	6,36
Luas Kabupaten Siak			8.556,09	100

Sumber: BPS, Kabupaten Siak. 2021.

4. Monografi Kabupaten Siak

Masalah penduduk di Kabupaten Siak sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Minas	15.991	15.245	31.236
2	Kandis	36.184	34.281	70.456
3	Siak	13.085	13.085	26.651
4	Sungai Apit	14.888	14.637	29.525
5	Sungai Mandau	4.564	4.295	8.859
6	Kerinci Kanan	14.111	13.171	27.282
7	Lubuk Dalam	16.452	15.191	31.643
8	Tualang	64.536	60.358	124.894
9	Koto Gasib	11.230	10.829	20.440
10	Dayun	16.452	15.191	31.643
11	Bunga Raya	12.997	12.403	25.400
12	Mempura	8.684	8.313	16.997
13	Sabak Auh	5.904	5.794	11.698
14	Pusako	3.087	2.816	5.903

Sumber: BPS, Kabupaten Siak 2021.

B. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak

1. Tugas

Berdasarkan Perda Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bapeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak. Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak

adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan keijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Kantor Kesatuan Bangsa dan politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasukkan pada ayat satu :
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan politik.
 - Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan Bangsa dan Politik.
 - Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kantor.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak memiliki fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan dan politik.

- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha kantor.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Siak terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa
- d. Kepala Seksi Fasilitas Infrastruktur Politik

C. Sejarah Singkat Desa Simpang Perak Jaya, Kerinci Kanan, Kabupaten Siak

Pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto, untuk mensukseskan program Replita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), melalui program salah satunya Transmigrasi, mengingat jumlah penduduk yang sangat pada di pulau Jawa, dan pada tahun 1993 transmigrasi ditempatkan di Riau. Pada awal transmigrasi nama Wilayah tersebut UPT 7 Desa Simpang Perak Jaya, Simpang Perak Jaya berdasarkan sejarahnya di ambil dari nama simpang yang menuju masuk ke Desa, yaitu Simpang Perak Jaya, Berdasarkan musyawarah para tokoh terbentuklah nama desa Simpang Perak Jaya.

Pemerintahan pada masa itu (1993-1995) di pimpin oleh KUPT yaitu Bapak Sapril, dan Pjs Kepala Desa adalah Bapak Drs. Lujita, Seiring berjalannya waktu Pjs Kepala Desa pun berganti, dan di gantikan oleh Bapak M Yusuf Djamiran (1995-1999), dan yang menjadi kepala Desanya adalah Bapak M. Yusuf Djamiran dan berjalan sampai tahun 2005 Selanjutnya yang memimpin Pemerintahan Desa Simpang Perak Jaya untuk periode 2005-2010 adalah H. Zainudin MS dan dari tahun 2010 sampai dengan 2016 pemerintahan desa di pimpin oleh Bapak H. Soma Imam Nuryadi. Dan sekarang Pemerintah desa dipimpin oleh Bapak Rubiman Zainuri.

B. Letak Geografis dan Demografi

1. Letak Geografis

Kampung Simpang Perak Jaya terletak didalam wilayah Kcamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Gabung Makmur
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan PT. Indosawit Subur
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat berbatsan dengan Kabupaten pelalawan

Luas wilayah Kampung Simpang Perak Jaya adalah 1.309Ha

Dimana Geografi Kmapung Simpang Perak Jaya terletak antara 01.01 LU s/d 10.09 Lu-102,041 BT s/d 102.59 BT. Sebagian besar kampung ini merupakan daerah daratan rendah hingga menengah, dengan ketinggian

sekitar 15 meter diatas permukaan laut. Kampung Simpang Perak Jaya juga berada diantara 2 (dua) Perusahaan Besar Yitu PT.Rapp dan PT.IIS (Inti Indosawit Subur).

2. Keadaan Demografis

Penduduk Kampung Simpang Perak Jaya berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari jawa Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan local yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kampung Simpang Perak Jaya dan hal tersebut secara efektifitas dapat menghindarkan adanya benturan-benturan, kampungSimpang Perak Jaya mempunyai jumlah penduduk 3000 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 1.474 jiwa, perempuan 1.386 orang dan 677 KK , yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Desa Simpang Perak Jaya

Jenis Kelamin	Dusun I	Dusun II	Dusun III
Laki-laki	492 Orang	539 Orang	443 Orang
Perempuan	443 Orang	518 Orang	425 Orang
	935 Orang	1.075 Orang	868 Orang

Sumber : Data 2021

Berdasarkan tabel diatas maka yang berjenis laki-laki pada dusun satu terdiri dari 492 orang, dusun dua 539 orang dan dusun tiga 443 orang. Sedangkan untuk jumlah perempuan dusun satu 443 orang, dusun dua 518 orang dan dusun tiga 425 orang. Maka disimpulkanlah jumlah total nya dusun satu 935 orang, dusun dua 1.075 orang dan dusun tiga 868 orang.

C. Pendidikan dan Pekerjaan

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Simpang Perak Jaya sebagai berikut :

Tabel IV.5 Tingkat pendidikan Desa Simpang Perak Jaya

Jenis Kelamin	Prasekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana
Laki-laki	132 Orang	420 Orang	553 Orang	576 Orang	11 Orang
Perempuan	113 Orang	300 Orang	336 Orang	400 Orang	21 Orang
Total	245 Orang	720 Orang	889 Orang	967 Orang	32 Orang

Sumber : Data 2021

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa jumlah tingkat pendidikan anak prasekolah 245 orang, tingkatan SD berjumlah 7200, untuk SMP berjumlah sebanyak 889 orang, Sma berjumlah 976 orang dan sarjana berjumlah 32 orang.

2. Pekerjaan

Karena Desa Simpang Perak Jaya merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel IV.6 Pekerjaan Desa Simpang Perak Jaya

Petani	Nelayan	Pedagang/Swasta	Buruh	PNS	Pegawai Swasta
512KK	-KK	50KK	65KK	35KK	16KK

Sumber : Data 2021

Dari Tabel diatas disimpulkan bahwa yang bekerja menjadi petani adalah pekerjaan yang lebih banyak digeluti oleh masyarakat Desa simpang perak jaya dengan total 512 kepala keluarga. Kondisi Ekonomi masyarakat Desa simpang perak jaya bermata pencarian petani, sebagian

ada pedagang, buruh harian, perkebunan karet dan sawit dengan penghasilan rata-rata lebih kurang dari 2.500.000, perbulan selain sector non formal, masyarakat desa simpang perak jaya sebagian disektor formal seperti PNS, pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis dan lain –lain.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian tentang Fungsi pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Simpang Perak Jaya Kabupaten Siak (Studi Kasus lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga), Dengan demikian untuk memperoleh data yang selanjutnya yang akan dianalisis maka penulis perlu mencari data yang akurat dari informan yang mengetahui fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa simpang perak jaya kabupaten siak.

Responden dalam penelitian yang sudah dilakukan terdiri dari 1 (satu) orang kepala Desa simpang perak jaya, 1 (satu) orang kaur perencanaan desa simpang perak jaya, 1 (satu) orang Kerani desa simpang perak jaya, 1 (satu) orang RT Desa simpang perak jaya, 1 (satu) orang Rw desa simpang perak jaya dan 1 (orang) Masyarakat.

Sebagai bahan informasi wawancara yang sudah dilakukan kepada Responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah identitas responden. Hal ini mempunyai tujuan untuk lebih mengetahui tingkatan dari populasi responden dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang disajikan Penulis pada penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan unsur genetika dari para responden. Untuk lebih jelas identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat di bawah ini :

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Responden	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Desa simpang perak jaya	1	
2	Kerani Desa Simpang perak jaya	1	-
3	Kaur Desa simpang perak jaya	1	-
4	Masyarakat	1	-
	Jumlah	4	
	Persentase	100%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2021

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden penelitian laki-laki sebanyak 6 orang. Pada tabel di atas terlihat lebih dominan responden laki-laki, Dalam sebuah penelitian jenis kelaminresponden tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian selama responden tersebut bersedia memberikan jawaban yang benar adanya, karena jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir seorang terhadap suatu penelitian.

2. Usia Responden

Sebuah penelitian tentunya tidak dapat di ukur dari batasan usia, walaupun kedewasaan pola pikir ditentukan dari usia, namun kebanyakan orang pola pikirnya tergantung pada usia.

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Usia.

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	30-35	1	17%
2	40-45	3	50%
3	50-55	2	33%
	Jumlah	6	100%

Sumber : Hasil penelitian Lapangan 2021

Dilihat dari V.1 diatas dalam pengelompokan identitas responden di Desa simpang perak jaya, maka penulis dapat mengemukakan bahwa pada 6 orang di jadikan responden ada 1 orang yang 30-35 tahun, sebanyak 3 orang yang berumur 40-45 tahun dan sebanyak 2 orang juga yang berumur 50 keatas.

Dalam dunia kerja, tingkatan usia dari responden tersebut dapat dikategorikan baik, karena dilihat dari produktifitas kerja bahwa pada umur tersebut seseorang dikatakan sedang mengalami semangat bekerja yang tinggi atau dalam masa karir.

3. Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pekerjaan atau jabatan seseorang dalam perusahaan ataupun kantor-kantor pemerintahan serta lembaga-lembaga non departemen. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi cara berfikir seseorang dalam mengambil sebuah keputusan maupun dalam memberikan pendapat. Maka semakin tinggi tingkat pendidikan

yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian dan pola pikir yang dimilikinya. Dari hasil penelitian tentang fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa simpang perak jaya kabupaten siak maka dapat diketahui tingkat pendidikan para responden yang masuk dalam ruang lingkup penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S-1 (Sarjana)	1	17%
2	SMA	4	66%
3	SMP	1	17%
Jumlah		6	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2021

Seperti yang dapat dilihat pada tabel V.3 diatas dapat diketahui tingkat pendidikan responden dari 6 orang yang dijadikan responden sebanyak 1 orang atau 17% yang berpendidikan S1, sebanyak 4 orang atau 66% yang Berpendidikan SMA, dan sebanyak 1 orang atau 17% yang berpendidikan Smp.

B. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Simpang

Perak Jaya Kabupaten Siak (Studi kasus lembaga kemasyarakatan rukun tetangga dan rukun warga).

Data yang akan dipaparkan pada bab ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian mengenai Fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa simpang perak jaya kabupaten siak (studi kasus lembaga kemasyarakatan rukun tetangga dan rukun warga). Proses pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan observasi penulis selama melakukan

penelitian di lapangan, dari hasil Wawancara serta hasil dokumensati mengenai fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa simpang perak jaya kabupaten siak.

Setelah melakukan proses pengumpulan data, penulis melaksanakan proses pengolahan data yang diperoleh, kemudian akan dianalisa berdasarkan data-data yang telah didapatkan. Penulis melaksanakan proses pengolahan data dari data yang diperoleh, kemudian akan dianalisa berdasarkan data-data yang telah didapatkan, kemudian dari hasil yang diperoleh data tersebut akan diuraikan satu persatu beserta indikator yang telah penulis ajukan dalam kerangka pemikiran menggunakan teori yang telah dikemukakan oleh Edi Suharto (2006) yang mengemukakan bahwa Pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana

masyarakat akan menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi berbagi pengontrolan dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan pada masyarakat untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain dan dimana penelitian wawancara ini dibuat berdasarkan variable implementasi yang meliputi pemungkinan, penguatan, penyokongan, pemeliharaan, dan perlindungan. lebih jelasnya dianalisis sebagai berikut:

Untuk memperjelasnya, berikut ini adalah pembahas lebih lanjut mengenai fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa simpang perak jaya kabupaten siak adalah sebagai berikut :

1. Pemungkinan (enabling)

Menurut Edi Suharto (2005:87) Pemungkinan dalam penelitian ini adalah perubahan yang dilakukan untuk membuat masyarakat berkembang.

Untuk melihat Pemungkinan yang dilakukan Pemerintah Desa simpang perak jaya Dalam Fungsi Pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan melalui beberapa Sub indikator Sebagai berikut :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, Pemerintah Desa sudah melakukan hal tersebut dengan cara melakukan Musyawarah Dengan masyarakat dan membantu masyarakat-masyarakatnya Dalam mengembangkan Usaha-usaha atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki masyarakatnya Untuk mengembangkan Desa simpang perak jaya.

Dapat dilihat dari Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait tentang Bagaimana menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang yaitu :

Menurut Bapak Rubiman Zainuri selaku Kepala desa simpang perak jaya mengatakan :

Yaa stabil tingkat keamanannya kondusif, artinya tidak mempertajam permasalahan, kaalau ada masalah sikit-sikit, ya kita selesaikan kita musyawarahkan biar tidak ada satu sama lain yang salah paham dan bisa membuat warga kita damai, aman, tentram dan berkembang jadi tidak potensi menjadi suatu masalah. (Hasil Wawancara Tanggal 25 maret 2021)

Penjelasan yang tidak jauh berbeda dengan informan berikutnya :

Menurut Bapak Andreas selaku Ketua Rt Desa simpang perak jaya Mengatakan bahwa :

Dalam hal ini yang saya lihat kemungkinan lebih kepada sektor keamanan karena ini sektor utama dalam mengembangkan kegiatan atau memajukan Desa .(25 maret 2021)

Kemudian penulis Melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah wahid beliau selaku Rw di Desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret, hasil dari wawancaranya sebagai berikut :

Yaitu Pemerintah harus memiliki program atau Ide-ide baru, membuat inovasi yang dapat di terima oleh masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Suyadi selaku masyarakat Desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, hasil dari wawancara yaitu : *Ya pemerintah Desa sebisa mungkin membuat musyawarah dengan masyarakatnya agar bisa berkembang secara optimal.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa berupaya Selalu untuk membuat masyarakatnya bisa berkembang dan selalu hidup aman sejahtera.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa simpang perak jaya bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya Bisa menciptakan suasana atau potensi yang memungkinkan masyarakatnya berkembang

- b. Memberikan pembinaan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal, Pemerintah Desa sudah melakukan hal tersebut dengan cara memberikan Arahan-arahan langsung kepada masyarakatnya melalui musyawarah Desa.

Kemudian peneliti mewawancarai Kaur perencanaan desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021 yaitu :

Ya dengan cara pelatihan-pelatihan pemberdayaan, dan kaalau ada kegiatan harus ikut serta agar bisa memajukan desa sehinga bisa membuat desa kita berkembang secara optimal.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Andreas selaku ketua Rt Desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret, hasil wawancaranya sebagai berikut :

Pihak Pemerintah desa melakukan sosialisai langsung dan memberikan arahan langsung kepada masyarakat sehingga dapat di mengerti dengan baik.

Kemudian Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah Wahid selaku Ketua Rw Didesa simpang perak jaya pada tanggal 25 maret, hasil wawancara sebagai berikut :

Kalau ini, didesa ini kan tidak semuanya masyarakat mampu melaksanakan dengan baik, menurut saya lebih kepada arahan dan pendampingan langsung kepada masyarakatnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Suyadi selaku masyarakat desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret, hasil wawancara yaitu : *Pemerintah Desa harus lebih memperhatikan lagi masyarakatnya agar bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang telah di buat atau ditetapkan.*

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memberikan pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat agar bisa berkembang secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa simpang perak jaya bahwa pemerintah Desa dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat agar bisa berkembang secara optimal sudah dilakukan dengan baik hanya saja ada beberapa masyarakat yang kurang mendukung dengan kegiatan yang telah di buat atau di tetapkan pemerintah desa.

- c. Mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan
Pemerintah Desa sudah melakukan hal tersebut dengan cara

memasarkan atau menjual hasil-hasil yang di dapat dari kegiatan pemberdayaan tersebut.

Sebelum penulis Mencari tahu apakah pemerintah desa sudah melakukan mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan maka penulis melakukan wawancara kepada Kerani desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021 yaitu :

Ya dengan cara dipasarkan melalui koprasmi mikro dan makro atau dengan penjualan online, agar masyarakat lebih banyak tau kan sekarang jaman sudah canggih ni sudah rata rata mempunyai hp semua, dan cara itu lebih mudah untuk masyarakat mengetahuinnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Andreas selaku Ketua Rt pada tanggal 25 maret 2021, hasil wawancaranya yaitu : *Di Desa kan ada BUMKAM di sana masyarakat langsung bisa memasukan hasil yang di peroleh dan nantinya pihak Desa akan ikut membantu dalam memasarkan Hasilnya.*

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah Wahid selaku Ketua Rw di Desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, hasil wawancaranya yaitu :

Ada banyak cara, biasanya kalau di desa ini masyarakat langsung bisa ke Orangnya langsung untuk membeli atau bekerja sama dengan Bumkam

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Suyadi Selaku Masyarakat Desa simpang perak jaya pada Tgl 25 maret, hasil wawancaranya yaitu :

Menurut saya hasil dari pemberdayaan itu belum sepenuhnya bisa terjual dengan baik, karna masih banyak hasilnya kurang bagus, kurangnya perawatan, karna kalau sudah ditanam jarang dirawat atau lihat langsung kelapangan oleh kelompok-kelompok yang mengerjakannya dan pemerintah desa tidak mau menegur masyarakat yang lalai akan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan pemberdayaan tersebut.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa simpang perak jaya sudah melakukan beberapa cara untuk memasarkan hasil-hasil yang telah di dapatkan dari beberapa kegiatan pemberdayaan yang berhasil.

Berdasarkan hasil Observasi langsung yang peneliti lakukan di Desa simpang perak jaya bahwa pemerintah Desa sudah berupaya dalam mengarahkan hasil-hasil yang di daapat dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan tetapi belum terjalankan dengan maksimal dikarenakan masyarakatnya yang kurang tanggung jawabnya terhadap kegiatan yang telah dilakukan atau dikerjakan.

2. Penguatan

Menurut Edi Suharto (2005:87) Penguatan dalam penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat berkaitan dengan potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Untuk melihat Penguatan yang dilakukan pemerintah Desa dalam Fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa simpang perak jaya dapat diuraikan melalui beberapa Sub indikator yaitu :

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah, Pemerintah Desa sudah melakukan hal tersebut dengan cara memberikan nasehat-nasehat dan tidak membiarkan masalah yang terjadi berlarut-larut.

Kemudian peneliti melakukan wawancara ke Kepala Desa simpang perak jaya Untuk mengetahui lebih lanjutnya yaitu :

Ya Dengan cara Edukasi ya contohnya seperti kelompok dasawisma, melalui posyandu, kelompok-kelompok kerja dengan hal ini propping dan berkolaborasi dengan RAPP. Terus masyarakatnya diajak untuk mengikuti pelatihan pemberdayaan yg di fasilitasi oleh Pemerintah desa.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Andreas selaku Ketua Rt di Desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, hasil wawancaranya yaitu :

Menurut saya dengan memberikan gambaran atau arahan langsung kepada masyarakatnya.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Abdullah wahid selaku Ketua Rw Desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, hasil wawancaranya yaitu : *Masyarakat disini di berikan Edukasi dalam melakukan kegiatan yang diinginkan atau yang dilakukan.*

Selanjutnya saya mewawancarai Bapak Suyadi selaku Masyarakat di Desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, hasil wawancara yaitu :

Sejauh yang saya lihat pemerintah Desa lumayan sering mengadakan musyawarah untuk menampung pendapat-pendapat masyarakat dan memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang telah ditetapkannya

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memberikan pengarahan dan pengetahuan kepada masyarakatnya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa simpang perak jaya bahwa yang saya lihat pemerintah Desa belum sepenuhnya melakukan hal tersebut.

- b. Memberikan pendapat dan pengarahan kepada masyarakat, bahwa pemerintah Desa sudah melakukan hal tersebut dengan cara membuat kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang bisa masyarakat lakukan dengan baik dan positif, dan pemerintah desa ada membuat grup whatsapp untuk memebrikan pendapat atau ide-ide yang mereka miliki.

Untuk mengetahui lebih lanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kerani desa simpang perak jaya yaitu :

Ya kalau kami memberikan pendapat dan pengarahan itu ada berbagai cara kami punya grup whatsapp kita memanfaatkan teknologi dengan membuat grup whatsapp bahkan untuk masyarakat kami ada info tentang desa, grup whatsapp untuk desa dimana disitu nanti kebijakan-kebijakan tentang Desa kita sampaikan disitu. Kemudian kami sekarang lagi belajar untuk membuat website dan caranya yang jelaskalau untuk sosialisai penyampaian kami selalu menggunakan acara musyawarah jadi dengan pertemuan kayak kemarin kami melaksanakan kegiatan gotong royong, nah kegiatan rutin, kami ada rutin pertemuan dengan BAPEKAM, ada rutin dengan RT dan RW ada rutin dengan Tokoh-tokoh masyarakat kemudian dengan masyarakat desa simpang perak jaya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak andreas selaku ketua Rt di desa simpang perak jaya pada Tgl 25 maret 2021, yaitu :

Melakukan kegiatan pertemuan atau musyawarah antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk menyampaikan pendapat, keluhan atau kendala yang dihadapi selama ini.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Abdullah wahid selaku Ketua Rw didesa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, yaitu :
diDesa ini sering mengadakan pertemuan masyarakat dengan pemerintah desa untuk membicarakan hal-hal yang bisa membuat desa ini maju dan berkembang, kadang juga kami sharing-sharing di grup Whatsap desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memberikan pendapat dan pengarahan kepada masyarakatnya dengan cara

sering mengadakan pertemuan-pertemuan antar masyarakat, untuk melakukan musyawarah menyampaikan pendapat dan memberikan arahan kepada masyarakatnya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pemerintah desa sudah melakukan hal tersebut walaupun belum semaksimal mungkin, tetapi ada beberapa cara yang mereka lakukan untuk memberikan pendapat dan pengarahan untuk masyarakat desa simpang perak jaya.

3. Penyokongan

Penyokongan dalam penelitian ini adalah memberikan bimbingan, penyuluhan dan dukungan agar masyarakat mampu mendapatkan akses informasi yang lebih sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada (Edi Suharto (2005:87)).

Untuk melihat penyokongan yang dilakukan pemerintah desa dalam fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa simpang perak jaya dapat diuraikan melalui beberapa Sub indikator yaitu :

- a. Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan tugas-tugasnya, bahwa pemerintah desa sudah melakukan hal tersebut dengan memberikan arahan-arahan langsung kepada masyarakatnya, memberikan motivasi-motivasi yang bisa mendorong masyarakatnya untuk lebih baik lagi.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan kaur perencanaan Desa simpang perak jaya yaitu :

Ya harus membimbing dan memberikan dukungan sehingga masyarakatnya mampu untuk mengembangkan atau menerapkan apa yang didapatnya secara

individu atau kelompok untuk dijadikan sumber pemasukan ekonomi baru buat mereka. Serta pemerintah desa selalu mengawasi dan mendorong dalam proses pengembangan pemberdayaan tersebut.

Untuk mengetahui lebih lanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Andreas Selaku Ketua Rt di Desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, hasil wawancara yaitu :

Nah biasanya ya diberikan motivator atau motivasi untuk memberikan semangat dan memeberikan kepercayaan kepadanya agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah Wahid selaku Ketua Rw di Desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, hasil wawancara yaitu :

Pemerintah Desa melakukan mengadakan pertemuan dengan para motivator yang ssukses melaksanakan kegiatan pemberdayaan di desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suyadi selaku masyarakat di Desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, hasil wawancara yaitu :

Menurut saya ya adalah beberapa pemerintah desa ikut turun kelapangan melihat hasil kerja dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut agar bisa membimbing langsung masyarakatnya untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa memberikan bimbingan dan dukungan langsung kemasyarakatnya agar bisa menjalankan tugas-tugas yang di berikan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di desa simpang perak jaya bahwa belum sepenuhnya pemerintah desa memberikan dukungan kepada masyarakatnya.

- b. Mampu menyokong masarakat agar tidak terjadi dalam posisi yang semakin lemah dan terpingirkan, bahwa Pemerintah Desa sudah melakukan hal tersebut dengan cara melakukan memberikan partisipasi yang cukup, mendukung apa yang dilakukan masyarakat selagi masih positif.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada kerani Desa simpang perak jaya yaitu :

Harus memberikan porsi dan dukungan yang lebih pada mereka, partisipasi yang tinggi terhadap masyarakat dalam ini kan selama ini masyarakat sebagai obyek kita jadikan subyek.

Untuk mengetahui lanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Andreas selaku Ketua Rt di Desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, hasil dari wawancara yaitu :

Memberikan kegiatan dan melakukan sosialisasi langsung kemasyarakatnya, dan jangan membeda-bedakan satu sama lain.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah Wahid selaku Ketua Rw di Desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, hasil wawancara yaitu :

Harus mengontrol langsung, menanyakan kendala yang dihadapi dan mencari solusi terbaik untuk masyarakat agar mereka tidak merasa lemah dan terpingirkan.

Kemudian saya melakukan wawancara dengan Bapak Suyadi selaku masyarakat di Desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, hasil dari wawancara yaitu :

Menurut saya pemerintah desa jangan membeda-bedakan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, dan pemerintah selalu mendukung apapun kegiatan yang dilakukan warganya selagi itu positif.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa mengontrol langsung kelapangan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada agar tidak ada masyarakat yang terpingirkan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa simpang perak jaya bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya melaukan hal tersebut, karna masih banyak yang saya lihat masyarakat yang selalu terpingirkan dan terkucilkan.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan dalam penelitian ini yaitu Situasi yang kondusif harus selalu terjaga dan terpelihara, hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan peran kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat Edi Suharto (2005:87).

Untuk melihat Pemeliharaan yang di lakukan pemerintah Desa bahwa fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa simpang perak jaya dapat di Uraikan melalui beberapa sub indikator sebagai berikut :

- a. Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat, bahwa Pemerintah Desa sudah melakukan hal tersebut dengan cara membuat elemen-elemen didesa dan menyuruh warga melakukan kegiatan dengan tupoksinya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti apakah pemerintah Desa mampu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Wawancara ini dilakukan dengan keranin desa simpang perak jaya Bahwa :

Ya kalau ditanya mampu atau tidaknya pemerintah desa ya harus mampu untuk menjaga kondisi yang kondusif dalam distribusi kekuasaan karna kan distribusi kekuasaa itu artinya setiap elemen-elemen yang didesa itu harus bekerja dengan tupoksinya masing-masng, dan kewajibannya masing-masing.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Andreas selaku Ketua Rt di desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, hasil wawancara yaitu :

Ini seperti tanggung jawab, harus mampu dan bertanggung jawab di setiap kegiatan yang akan dibuat oleh pemerintah desa

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah Wahid selaku Ketua Rw di desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, hasil dari wawancara yaitu :

Kami harus mampu karena ini merupakan tanggung jawab dan harus siap terhadap resiko yang akan datang.

Selanjutnya saya melakukan wawancara kepada Bapak Suyadi selaku masyarakat di desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret, hasil dari wawancara yaitu :

Menurut saya masih belum efektif, ya bisa dilihat masih adanya kelompok-kelompok yang susah di bimbing atau diarahkan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa simpang perak jaya pada Hari kamis , 25 maret 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator terhadap Fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa simpang perak jaya, pemerintah Desa mampu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan antara kelompok-kelompok lainnya.

Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti lakukan di Desa simpang perak jaya bahwa pemerintah Desa belum sepenuhnya mampu memelihara kondisi yang kondusif untuk menjaga keseimbangan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Karna yang saya lihat masih banyak masyarakat yang mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kelompok disekitarnya.

5. Perlindungan

Menurut Edi Suharto (2005:87) Perlindungan dalam penelitian ini yaitu merupakan proses yang melindungi tahapan yang telah dicapai dalam proses kegiatan pemberdayaan.

Untuk melihat Perlindungan yang dilakukan Pemerintah Desa bahwa Fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa simpang perak jaya dapat diuraikan melalui beberapa sub indikator yaitu :

- a. Mampu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok lain, bahwa Pemerintah Desa sudah melakukan hal tersebut dengan cara melakukan membuat aturan-aturan yang tidak merugikan masyarakat , dan dengan tidak membeda-bedakan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, apakah pemerintah desa mampu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok lain. Wawancara ini dilakukan dengan kaur perencanaan desa simpang perak jaya bahwa :

Itu kewajiban Desa pemerintahan desa untuk mengayomi masyarakat yang lemah. Sehingga kalau ditanya dia mampu harus mampu karna itu istilahnya kewajiban dari pemerintahan desa mengayomi cara kami mengayomi ya termasuk dengan istilahnya dengan membuat aturan-aturan yang istilahnya tidak merugikan masyarakat yang golongan lemah dan istilahnya bagaimana caranya untuk kebijakan-kebijakan mulai dari kebijakan penggunaan dana desa itu memang bisa dirasakan aspirasinya dari masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Andreas selaku Ketua Rt di desa simpang perak jaya pada tgl 25 maret, hasil dari wawancara yaitu : *Saya tidak tau bisa atau tidaknya tapi kami sebagai Aparatur pemerintah desa kami akan tetap membantu apapun itu untuk memajukan Desa ini*

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Abdullah Wahid selaku Ketua Rw didesa simpang perak jaya pada tgl 25 maret 2021, hasil dari wawancara yaitu :

Hal ini sering terjadi dikarena persaingan, tetapi Pemerintah desa akan berusaha untuk melindungi masyarakat-masyarakat desa agar tidak tertindas antar kelompok-kelompok yang ada.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suyadi selaku Masyarakat di Desa simpang perak jaya pada tanggal 25 maret2 2021, hasil dari wawancara yaitu :

Konflik seperti ini yang sering terjadi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan tetapi pemerintah Desa tidak lepas tangan begitu saja kalau ada permasalahan dalam suatu kegiatan mereka ikut serta menyelesaikannya agar tidak ada masyarakat-masyarakat yang tertindas antar Kelompok-kelompok yang ada.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa simpang perak jaya pada Hari kamis , 25 maret 2021, peneliti menyimpulkan dari indikator terhadap Fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa simpang perak jaya Pemerintah Desa selalu ikut berperan didalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang

dilakukan masyarakat untuk melihat dan melindungi kelompok-kelompok masyarakat agar tidak tertindas satu sama lain.

Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti lakukan di Desa simpang perak jaya bahwa Pemerintah Desa belum efektif mampu untuk mengayomi masyarakat yang lemah, dalam membuat aturan-aturan yang tidak bisa merugikan Kelompok-kelompok masyarakat Desa simpang perak jaya.

Berdasarkan Pembahasan indikator diatas maka dapat Disimpulkan bahwa Fungsi Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa Belum sepenuhnya terlaksanakan atau terjalankan. Tetapi ada sebagian sub indikator yang menurut warga dan pemerintah desa itu sudah dilakukan atau dijalankan.

C. Hambatan-hambatan dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Simpang Perak Jaya Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil observasi dan Wawancara penulis dengan sejumlah informan yang dapat memberikan informasi mengenai fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa simpang perak jaya kabupaten siak, yaitu :

1. Kurangnya partisipasi atau kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kerja bakti, seperti gotong royong dan lain-lainnya.
2. Kurangnya sumber Dana yang didapatkan oleh pemerintah desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

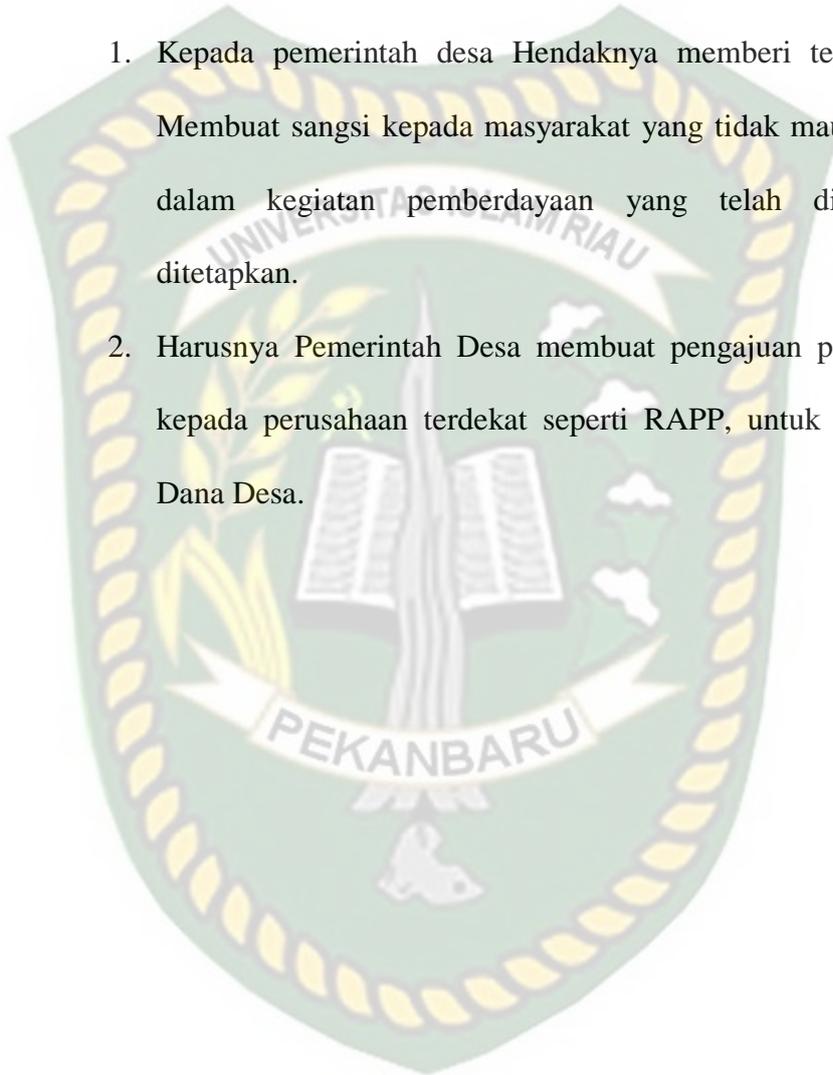
Berdasarkan hasil penelitian ini baik dari observasi dan wawancara dengan informan mengenai Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Simpang Perak Jaya Kabupaten Siak. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai Berikut:

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Desa simpang perak jaya masih kurang maksimal. Banyaknya warga yang tidak mau ikut melakukan kegiatan pemberdayaan yang telah dibuat atau di tetapkan, dan tidak mau mengembangkan atau berinovasi agar Desa simpang perak jaya dapat Berkembang seperti yang diinginkan. Dan pemerintah desa hanya membuat kegiatan-kegiatan pemberdayaan tidak menegur atau membuat sangsi terhadap masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dan dalam penyusunan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Bulan 6 akan dimulai musyawarah itu bertahap berjenjang dari mulai dusun, ditingkat dusun itu ada beberapa rt, rw, dan tokoh masyarakat. Dan Pemerintah desa harus bekerja sama dengan masyarakat agar bisa membuat Desa simpang Perak Jaya lebih Maju dan Berkembang.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah desa Hendaknya memberi teguran atau Membuat sangsi kepada masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dibuat atau ditetapkan.
2. Harusnya Pemerintah Desa membuat pengajuan permohonan kepada perusahaan terdekat seperti RAPP, untuk menambah Dana Desa.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku:

- Ali, Mubarak. 2010. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awang, Azam, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: pustaka pelajar
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara
- Edi Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eko, Sutoro, (2004), *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta.
- Enni, Hardiati. 2012. *Organisasi Sosial Lokal dan Modal Sosial Menuju Keberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Kansil dan Cristine, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moekijat (2008). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:BFPE
- Moeljarto, 2005. *Pemberdayaan (Empowerment) Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : CSIS
- Moleong, Lexy J. 2001. "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*". Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Nirmala, Andini T, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Prima Media
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta : Erlanga.

- Pambudi, Himawan S. dkk, *Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Yogyakarta, LAPPERA Pustaka Utama, 2003.
- Poernomo, Mangku. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Lapera
- Rauf, Rahyunir. 2005. *Kelembagaan RT/RW*. Pekanbaru
- Santoso, Purwo, 2006. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Jogjakarta : pustaka pelajar.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Sunyoto, Usman. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Aksara Baru.
- Syaukani, 2004, *Otonomi Daerah Demi Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta : Nuansa Madani.
- Totok Mardikato, 2010, *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Sebelas Maret University Pers
- Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada.
- Zainal , Nining Haslinda . 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*. Makassar : FISIPOL

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2014 Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 5 Tahun 2007 tentang Pedoman peraturan Lembaga Kemasyarakatan

Jurnal

Astellia Janice, Pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa.

Lasmian Sugiri Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Syahrul Ramadhan, Analisis Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.

Fitri Ramadani, Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Vernal Michael Fina, Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Agustiawan, Peranan Lembaga Kemasyarakaatn Dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan.